



**The 5<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology  
(CIASTECH)**

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

**SINERGITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEKARANGAN  
PANGAN LESTARI MENCAPAI SDGS TANPA KELAPARAN DI KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**Muhammad Habibi<sup>1)</sup>**

*<sup>1)</sup> Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama  
Mahakam Samarinda*

**INFORMASI ARTIKEL**

**ABSTRAK**

**Data Artikel :**

Naskah masuk, 15 Agustus 2022

Direvisi, 20 September 2022

Diterima, 1 Oktober 2022

**Email Korespondensi :**

Habibi.mayangmaurai@gmail.com

Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara yang tergabung dalam United Nations (UN) turut melaksanakan program pembangunan berkelanjutan SDGs. Salah satunya adalah Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Untuk itu, Kabupaten Kutai Kartanegara turut mengimplementasikan program SDGs tanpa kelaparan melalui penguatan kemandirian P2L sebagai program kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan observasi dan peninjauan awal, keberadaan kebijakan program P2L masih memerlukan intervensi yang lebih intens lagi, terutama kepada kelompok sasaran, khususnya membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan replikasi P2L dipekarangan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggali peran dari stakeholder pentahelix dalam pembangunan kemasyarakatan yang meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas atau masyarakat dan media massa dalam rangka mendukung penguatan implementasi kebijakan program P2L mencapai SDGs tanpa kelaparan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan program P2L sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan SDGs tanpa kelaparan masih belum optimal, mengingat program ini sebagai program pilot project sehingga masih terbatas pada stakeholders yang terlibat. Dimana dari 5 (lima) stakehoders peran akademisi, pengusaha, dan media massa belum terlibat secara mendalam, termasuk peran dari pemerintah desa khususnya dari sisi kebijakan dan dukungan program pemberdayaan serta anggaran pada tingkat desa. Sehingga kedepannya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama para OPD perangkat daerah yang terkait pada bidang ini, melalui MoU dan MoA yang efektif dan terlaksana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Pekarangan Pangan Lestari, Implementasi Kebijakan, Agenda SDG's, Tanpa Kelaparan, Kutai Kartanegara*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara yang tergabung dalam United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi bagian pelaksana dari sejumlah program pembangunan global, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik yang sifatnya pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu program yang menjadi komitmen bersama adalah program yang bernama *Millennium Development Goals* atau MDGs., yakni sebagai sebuah program pembangunan millennium untuk mengatasi berbagai isu pembangunan.

MDGs merupakan program yang didesain dengan 8 (delapan) tujuan pembangunan dan telah dilaksanakan pada tahun 2000-2015. Namun, karena belum optimalnya pencapaian tujuan MDGs tersebut, akhirnya melalui Sidang Majelis Umum PBB pada 25 September 2015 menghasilkan kesepakatan baru untuk melanjutkan MDGs menjadi *Sustainable Development Goals* atau SDGs sebagai bentuk komitmen keseriusan pemimpin negara untuk meningkatkan ketercapaian tujuan pembangunan dengan target capaian pada rentang masa 2016-2030 mendatang. Mengingat hasil MDGs yang memerlukan penajaman fokus pada sektor atau bidang tertentu, maka pada SDGs dikembangkan menjadi 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan yang berkelanjutan [1]. Dimana salah satu dari 17 tujuan SDGs adalah tanpa kelaparan (zero hunger) sebagai tujuan kedua.

Secara spesifik poin kedua ini, yakni zero hunger dengan target memperjuangkan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan [2]. Sebagai upaya pemenuhan ketahanan pangan nasional, pemerintah melakukan penguatan sektor pertanian untuk menyokong perbaikan nutrisi bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah meluncurkan program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sejak 2010 sebagai sebuah kebijakan untuk mencapai target SDGs tanpa kelaparan sebagai sebuah komitmen yang kuat. Program ini pada tahun 2020 juga mendapat dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden (KSP) yang disampaikan langsung oleh Deputy III Bidang Perekonomian dengan fokus pada penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis termasuk bidang pertanian [3]. Dengan demikian, maka program P2L ini telah mendapat dukungan penuh dari pihak lingkaran istana negara. Sehingga program ini sebagai sebuah kebijakan dilaksanakan bukan oleh pihak Kementerian Pertanian saja pada tingkat nasional tetapi sudah menjadi perhatian dan bagian dari lembaga kenegaraan.

Program P2L di wilayah Kalimantan Timur menjadi sangat istimewa dan menjadi tantangan tersendiri bagi para stakeholders pada tingkat provinsi dan para stakeholders pada tingkat kabupaten / kota. Hal ini dikarenakan terdapat 1 (satu) wilayah sebagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan sebagai wilayah Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yakni khususnya wilayah Kecamatan Sepaku sebagai IKN baru pengganti Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Tantangan tersebut berupa (1) selama ini kondisi ketersediaan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur belum mencapai swasembada; dan (2) masih tingginya angka stunting. Sehingga kedua poin tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk itu Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, dimana pada bagian konsideran huruf a menyebutkan bahwa “dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, maka diwajibkan pada daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi 2019-2023 di tingkat Provinsi yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019” dan huruf b yakni “bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023, maka disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi

Kalimantan Timur". Dengan demikian, maka Pemerintah Kalimantan Timur berupaya memenuhi ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan di dukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan para stakeholders terkait.

Sebagai upaya mendukung Rencana Aksi Daerah tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah penyangga IKN Nusantara dengan luas wilayah adalah 20,41% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kutai Kartanegara juga menjadi penghasil khususnya tanaman padi sawah terbesar dengan produktivitas pada tahun 2020 adalah 34,72% dan pada tahun 2021 adalah 36,15% ku/Ha dengan besaran 2020 sebanyak 64.198,11 ton, dan tahun 2021 sebanyak 58.147,26 ton [4].

Kabupaten Kutai Kartanegara turut mengimplementasikan program SDGs tanpa kelaparan melalui penguatan kemandirian P2L sebagai program kebijakan pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui dukungan kolaborasi peran stakeholders pentahelix. Secara tugas dan kewenangan P2L berada dalam Pembinaan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluh bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan khususnya untuk ketersediaan tenaga penyuluh pertanian lapangan.

Berdasarkan observasi dan peninjauan awal, keberadaan kebijakan program P2L masih memerlukan intervensi yang lebih intens lagi, terutama kepada kelompok sasaran, agar dapat dibuktikan mendukung penguat implementasi ketercapaian program SDGs tanpa kelaparan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan replikasi P2L di rumah masing-masing, khususnya non anggota KWT. Untuk itulah penelitian ini dipandang penting dalam rangka mensinergikan implementasi kebijakan program P2L mencapai SDGs tanpa kelaparan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tataran stakeholders elit lokal.

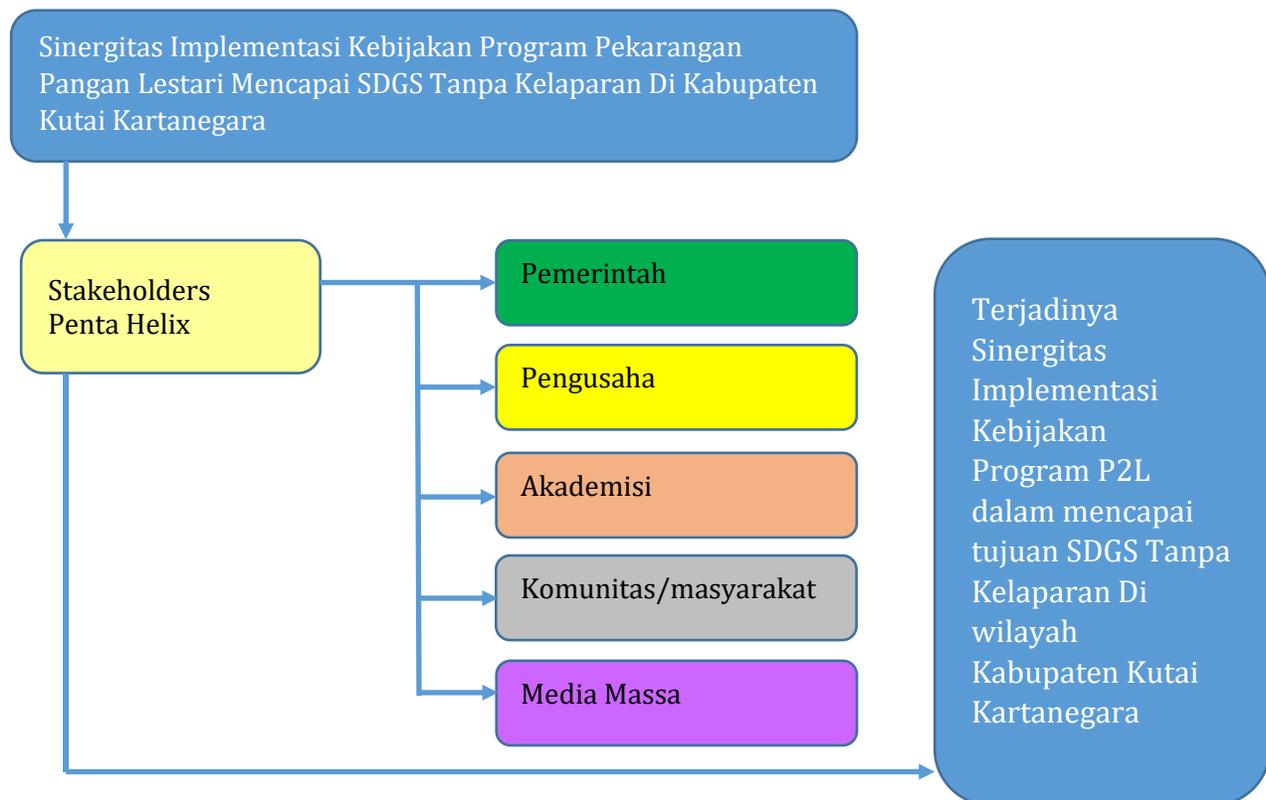
Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggali peran dari stakeholder pentahelix dalam pembangunan kemasyarakatan yang meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas atau masyarakat dan media massa dalam rangka mendukung penguatan implementasi kebijakan program P2L mencapai SDGs tanpa kelaparan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penelitian ini telah didahului oleh observasi dan survei melalui kunjungan kedua lokasi penerima program P2L yakni di Desa Muhuran Kecamatan Kota Bangun dan Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu. Kemudian penggalian informasi primer dan sekunder pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Definisi operasional pada penelitian ini mengacu kepada teori pentahelix sebagaimana yang dikemukakan oleh Astuti dkk bahwa "konsep penta helix dibangun di atas dua model sebelumnya teori *triple helix* dan teori *quadra helix*. Teori *triple helix* yakni pemangku kepentingan antara pemerintah (*government*), pengusaha (*business*) dan akademisi (*academician*). Sedangkan *quadra helix* ditambah dengan dimasukkannya satu pemangku kepentingan lainnya yakni masyarakat madani (*civil society*). Pemangku kepentingan *penta helix* disempurnakan menjadi 5 (lima) yakni media massa (*mass media*)" [5].

Untuk teknik analisa data menggunakan komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana pada tahun 2014 yang terdiri dari Pengumpulan data, Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan-kesimpulan / Verifikasi [6]. Selanjutnya gambar kerangka pikir penelitian.



Gambar 1. Kerangka penelitian

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program P2L yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2010 dimana ketika itu Program P2L masih bernama KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari yang meliputi tanaman sayuran keluarga untuk protein nabati dan pemenuhan protein hewani melalui ternak unggas berupa ayam kampung atau budidaya lele kolam terpal. Namun sejak tahun 2020 P2L hanya difokuskan pada tanaman sayuran. Hal tersebut mengingat pada beberapa kasus, khususnya ayam yang memakan kecambah dan daun tanaman sayuran, atau lele yang banyak gagal panen karena kurang pembinaan dalam menjaga kualitas air dan rutinitas pemberian pakan. Tahun 2021 senyak 6 (enam) kuota P2L untuk wilayah Kutai Kartanegara, dengan misi membantu menekan angka stunting, sehingga pada setiap anggota KWT harus ada orang tua anak yang berstatus stunting, pasangan muda yang sudah menikah, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta yang kurang mampu secara ekonomi memenuhi gizi keluarga.

Untuk awal implementasi P2L yakni penumbuhan setiap KWT memperoleh modal awal sebesar 60 juta rupiah, dan untuk peningkatan atau pengembangan sebesar 15 juta rupiah, program pemandirian berlangsung selama 2 tahun, selanjutnya tahun ketiga hingga kelima diharapkan sudah mampu mandiri yang ditandai dengan kemampuan membeli bibit sendiri, mengolah pupuk organik, memperluas dan memperbanyak demplot, serta banyak di replikasi pada pekarangan rumah tangga masyarakat bukan anggota KWT, serta terjadi penurunan atau tanpa kasus gizi buruk termasuk stunting.

Setiap KWT terdiri dari 30 (tiga puluh) anggota, dan biasanya yang aktif hanya 10-15 orang saja, karena sebagian anggota adalah para ibu-ibu petani yang aktif bertani di sawah atau ladang. Terutama saat awal musim tanam dan menjelang panen di ladang masing-masing, sudah dipastikan

akan meninggalkan jadwal piket perawatan di demplot KWT. Selain itu ada juga yang memiliki alasan lain seperti sibuk mengurus anak, kuatir tangan kotor, dan sejumlah alasan lain. Sehingga sebagian anggota KWT yang aktif terkadang harus mencoba memahami dan ada yang harus mengganti anggota kelompoknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum peran stakeholders yang dikonsepsikan didalam pentahelix pada implementasi program P2L dalam rangka turut mencapai target yang menjadi tujuan SDGs poin tanpa kelaparan belum optimal terjadi mengingat masih ada pihak yang belum terlibat atau dilibatkan. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada penjelasan yang dibahas satu per satu dari para stakeholders pentahelix tersebut.

### **1) Pemerintah**

Pada implementasi program P2L di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tataran pemerintah tentunya bukan hanya Pemerintah Kabupaten melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Pertanian dan peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan penyuluhan, Dinas Kesehatan, serta pihak Kecamatan, tetapi juga harus didukung oleh Pemerintah Desa.

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, peran dan upaya pencapaian tujuan SDGs tanpa kelaparan sudah berjalan cukup baik, terutama melalui program P2L. Dimana Dinas Ketahanan Pangan dan penyuluhan sudah berupaya memetakan jenis pangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama berhubungan dengan peningkatan nutrisi atau kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang bergizi tinggi, melalui kegiatan penggerakkan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) pada beberapa desa dengan berkoordinasi kepada pihak Pemerintah Desa yang dipandang mampu untuk mengimplementasikan program P2L.

Pada pelaksanaannya, para anggota KWT didampingi oleh tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), baik PPL yang ada di wilayah Kecamatan Kota Bangun untuk KWT yang ada di Desa Muhuran dan PPL yang ada di wilayah Kecamatan Loa Kulu untuk KWT yang ada di Desa Jongkang. Pembinaan dilakukan secara berkala teragenda 1 (satu) kali seminggu dan ketika ada kondisi atau permasalahan tanaman yang tidak mampu di tangani oleh anggota KWT, seperti adanya permasalahan hama, kondisi perubahan air yang menjadi sumber penyiraman, persemaian, hingga masalah gagal panen.

Namun, terdapat hal yang paling pokok yang belum dipahami dan belum menjadi perhatian para pemerintah desa dalam hal implementasi program P2L dalam rangka turut mencapai target yang menjadi tujuan SDGs poin tanpa kelaparan adalah (pertama) belum ada dukungan peraturan desa yang ditetapkan, dan (kedua) adalah belum masuknya program generalisasi P2L yang dilakukan oleh KWT kedalam program prioritas pembangunan desa untuk keberdayaan pemenuhan gizi masyarakat secara menyeluruh, khususnya keluarga atau anak dari keluarga menengah kebawah yang memerlukan perbaikan dan peningkatan asupan gizi yang bersumber dari protein nabati, yakni sayuran. Sehingga banyak anak yang kurang menyukai makan sayuran, khususnya sayuran hijau yang segar. Selain itu, diperlukan juga program pemberdayaan dan pembinaan oleh pemerintah desa bersama praktisi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) seperti bimbingan memasak, agar nutrisi yang ada pada makanan tidak menghilang, karena ketidapkahaman cara memasak yang tepat. Akan tetapi, ketika KWT tersebut berhasil kemudian mendapat nominasi bahkan penghargaan, kemudian pihak Pemerintah Desa atau PKK tadi muncul yang mengaku sebagai pembina dan pengayom. Padahal para KWT ketika proses pelaksanaan program P2L tertatih-tatih agar tercapai tujuan program P2L dan membuat malu bahkan kecewa pemerintah desa.

Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih optimal oleh Pemerintah Desa bersama PKK, aparat desa, dan lembaga lain yang ada dalam sistem pemerintahan desa secara menyeluruh termasuk pergerakan para pemuda desa yang tergabung dalam Karang Taruna. Agar program P2L dengan pilot project yang digerakkan oleh KWT dapat di generalisasi kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan yang dipandang lebih memiliki peran dalam pencapaian tujuan SDGs tanpa kelaparan dalam ranah domestik rumah tangga.

## **2) Pengusaha**

Peran dari stakeholders pentahelix kedua yakni peran pengusaha pada implementasi program P2L dalam rangka turut mencapai target yang menjadi tujuan SDGs poin tanpa kelaparan. Pada kedua lokasi penelitian menunjukkan bahwa belum ada peran dari pengusaha lokal maupun dari luar desa yang terlibat dalam implementasi P2L.

Hal ini menunjukkan ada 2 (dua) hal, yang pertama program yang diimplementasi oleh KWT belum menarik minat para pengusaha setempat untuk terlibat, dan yang kedua adalah pelaksanaan P2L masih eksklusif pada stakeholders sektor pertanian saja, sehingga belum ada upaya membangun akses untuk berkolaborasi dengan pengusaha. Kolaborasi yang dimaksud sebenarnya dapat berupa dukungan pengembangan demplot pada sebagian bidang lahan sebuah perusahaan, atau dukungan dari pengusaha pembuat pupuk organik yang akan digunakan untuk merawat dan menjaga kesuburan tanaman sayuran tersebut. Selain itu, menjaid mitra untuk menampung hasil panen pengembangan dan perluasan demplot sebagai bahan untuk warung makan, bahan tambahan untuk makanan ringan atau camilan seperti kerupuk daun bayam goreng tepung da lainnya.

Sejauh ini yang menampung hasil panen adalah penjual sayur keliling saja, dimana sayuran tersebut dijual ke desa lain atau dibawa kepasar desa. Dimana hasil penjualan digunakan untuk membeli bibit dan pupuk organik dalam hal ini adalah pupuk kandang yang dibeli dari kelompok tani peternak sapi yang ada di sekitar wilayah desa setempat. Hasil panen yang dijual biasanya dari demplot pengembangan atau perluasan. Sedangkan dari demplot rumah P2L hasil panen di bagikan kepada anggota dan untuk keluarga yang memiliki anggota stunting atau gizi buruk secara gratis.

Jadi pada dasarnya untuk implementasi P2L pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara belum terdapat peran pengusaha dalam pengembangan atau perluasan demplot yang dikelola oleh KWT sebagai dukungan atas program pemerintah yang secara nyata sudah memberi manfaat bagi keluarga anggota KWT itu sendiri maupun bagi keluarga yang memiliki anggota penderita stunting atau gizi buruk. Hingga saat ini untuk lahan yang digunakan para KWT dalam mengimplementasikan progral P2L adalah lahan milik salah satu anggota KWT atau lahan milik pemerintah desa dengan sistem kontrak minimal 5 (lima) tahun untuk memastikan keberhasilan program P2L yang dilaksanakan oleh KWT dapat berstatus mandiri sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi P2L oleh KWT.

## **3) Akademisi**

Implementasi program P2L di kedua lokasi penerima program sejauh ini peran akademisi belum optimal. Hingga saat ini hanya ada mahasiswa yang melakukan penelitian untuk tugas akhir atau skripsi serta sebagai salah satu lokasi pembelajaran saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun belum ada Memorandum of Understanding (MoU) misalkan antara Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinasi Pertanian dan Peternakan, maupun Pemerintah Desa dengan salah satu atau beberapa kampus yang ada di Kalimantan Timur, baik kampus yang berdomisili di Tenggarong atau Samarinda untuk menjadi pembina, pendampingan atau pemberdayaan dari program P2L tersebut.

Peran akademisi dipandang sangat penting dalam program P2L mengingat pusat perkembangan pengetahuan salah satunya ada pada kalangan akademisi, tentunya sesuai bidang,

yakni pertanian atau agroteknologi, dan pembangunan sosial. Selain itu, program P2L juga dapat menjadi sarana laboratorium mini bagi para dosen untuk mengembangkan penelitian dan sekaligus sebagai lokus dalam pengabdian kepada masyarakat.

Untuk itu, kiranya perlu untuk segera terjadi kolaborasi, baik itu inisiasi dari OPD terkait maupun dari inisiasi dari pihak akademisi. Mengingat P2L ini merupakan program nasional untuk keberdayaan dan kemandirian masyarakat pada tingkat perdesaan, serta pemenuhan ketahanan pangan keluarga yang juga turut menjadi bagian pencapaian tujuan SDGs poin tanpa kelaparan dengan perbaikan nutrisi atau gizi terutama yang bersumber daya protein nabati yang sering diabaikan dalam pola asuh pemberian makanan pada sebuah keluarga, karena anaknya tidak menyukai sayuran dan lebih memilih cemilan produksi perusahaan besar yang kurang memperhatikan keseimbangan gizi.

#### **4) Komunitas**

Komunitas sebagai induk dari KWT sudah seharusnya memiliki peran yang tinggi pada program P2L tersebut. Hanya saja sejauh ini, masih banyak sebagian anggota masyarakat dalam hal ini ibu-ibu terutama yang baru menikah masih belum ambil peran. Pemikiran sederhana mereka adalah takut tangan kotor, atau kuku patah, masih ada orang tua atau mertua yang membantu mencukupi kebutuhan ketersediaan pangan keluarga.

Selain itu masih ada keluarga yang memandang masih mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga karena memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai dan mencukupi. Kemudian masih ada keluarga dengan kasus stunting yang lebih memilih hanya sebagai penerima sebagian hasil panen dari demplot rumah P2L yang dilakukan oleh KWT, dan belum mampu untuk menanam atau mengembangkan sendiri tanaman sayuran di pekarangan rumah sendiri.

Memahami konteks tersebut, kiranya masih perlu sosialisasi dan upaya-upaya pendekatan agar pemikiran demikian dapat diminimalisir atau bahkan dianulir. Sehingga peran komunitas dapat lebih optimal dan semakin banyak warga yang terlibat dalam pengembangan menunjukkan tingkat keberhasilan program P2L pada suatu desa yang ditunjuk sebagai demplot pilot.

Meskipun demikian, sudah ada sejumlah warga terutama kaum perempuan yang mereplikasi program P2L pada pekarangan masing-masing. Selain itu, dari kaum pria juga ada yang membantu para isteri untuk menyiapkan pupuk, pot tanaman dari kayu atau bahan bekas, dan bentuk partisipasi. Kemudian juga ada kaum pria yang terlibat dalam membantu KWT untuk membangun demplot rumah atau lantai panggung agar tanaman tidak terendam saat ada hujan dengan aliran air yang dapat merusak bibit tanaman dalam persemaian sebagai wujud peran komunitas.

#### **5) Media Massa**

Pada lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tingkat pemerintahan daerah, peran media massa dalam memberitakan adanya implementasi program P2L sudah ada, namun bersifat momentum atau saat ada press release atau launching program saja. Tetapi untuk adanya kerjasama yang bersifat berkelanjutan belum ada, seperti melalui MoU yang ditunjang dengan adanya Memorandum of Agreement (MoA). Sedangkan pada tingkat pelaksana program P2L di perdesaan, belum ada sama sekali. Hal ini terjadi mengingat belum adanya pemikiran pentingnya publikasi dalam rangka memotivasi masyarakat atau komunitas untuk mereplikasi program P2L di rumah masing-masing sebagai pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang hanya dibiarkan ditumbuhi rumput liar atau semak belukar.

Pada sisi ekonomis, publikasi tidak harus melalui media massa profesional. Publikasi dan sosialisasi dapat dilakukan sendiri oleh para anggota KWT atau dibantu dan didampingi oleh petugas PPL yang selama ini mendampingi KWT, dengan memanfaatkan aplikasi yang ada pada smartphone seperti *facebook*, *Whatsapp status* atau aplikasi lainnya, selama ada signal internet dan bukan pada wilayah *blank spot*. Dalam kekinian berbagai aplikasi tersebut sudah menyentuh

masyarakat diperdesaan yang bisanya dipergunakan lebih kepada eksistensi seseorang, sehingga sudah saatnya juga diarahkan kepada anggota KWT atau petugas PPL untuk menunjukkan keunggulan program P2L kepada warga lainnya. Sehingga kedepannya lebih banyak lagi replikasi P2L oleh masyarakat atau komunitas seperti petani, nelayan, daerah aliran sungai dalam rangka turut meningkatkan serapan gizi keluarga dan menghemat pengeluaran untuk pembelian jenis sayuran yang dapat ditanam secara mandiri.

#### **4. KESIMPULAN**

Tahun 2021 sebanyak 6 (enam) kuota P2L untuk wilayah Kutai Kartanegara, dengan misi membantu menekan angka stunting, sehingga pada setiap anggota KWT harus ada orang tua anak yang berstatus stunting, pasangan muda yang sudah menikah, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta yang kurang mampu secara ekonomi memenuhi gizi keluarga. Untuk penumbuhan, setiap KWT memperoleh modal awal sebesar 60 juta rupiah, dan untuk peningkatan atau pengembangan sebesar 15 juta rupiah, program pemandirian berlanjung selama 2 tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan program P2L sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan SDGs tanpa kelaparan masih belum optimal, mengingat program ini sebagai program pilot project sehingga masih terbatas pada stakeholders yang terlibat. Dimana dari 5 (lima) stakehoders peran akademisi, pengusaha, dan media massa belum terlibat secara mendalam, termasuk peran dari pemerintah desa khususnya dari sisi kebijakan dan dukungan program pemberdayaan serta anggaran pada tingkat desa.

Padahal kelima stakeholder tersebut terlibat langsung dan mendalam, maka program P2L akan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung ketercapaian SDGs untuk tujuan (goals) tanpa kelaparan. Sehingga kedepannya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama para OPD perangkat daerah yang terkait pada bidang ini, melalui MoU dan MoA yang efektif dan terlaksana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

*Alhamdulillah rabbil 'alamiin*, atas berkat rahmat Allah SWT Kegiatan penelitian dengan judul “Sinergitas Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari Sebagai Implementasi SDGs Tanpa Kelaparan Di Kabupaten Kutai Kartanegara” dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Bapak Dr. Drs. Ali Mushofa, M.M. sebagai Rektor UWGM Samarinda yang berkomitmen untuk memajukan dan mendukung kegiatan Penelitian yang dilaksanakan para dosen.
- 2) Ibu Hj. Purwati, S.P., M.P. selaku Kepala LPPM UWGM Samarinda beserta jajaran yang memprogramkan penelitian para dosen setiap semester, beserta pendanaan.
- 3) Para informan yang bersedia memberikan informasi
- 4) Penyelenggara Ciastech 2022, atas perkenan artikel penelitian ini menjadi salah satu peserta.

Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan anugerah kepada kita semua. Aaamiin

Samarinda, 30 Oktober 2022

#### **6. REFERENSI**

- (1) Murtisari, Mardella Savitri.2020. 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Atau SDGs, Kenali dan Pahami Maksudnya. 07 Okt 2020, 19:30 WIB. Diakses pada 25 Oktober 2022 Pukul 22.23 wita, hlm.1.

- <https://hot.liputan6.com/read/4376458/17-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-atau-sdgs-kenali-dan-pahami-maksudnya>
- (2) SDGs Indonesia. 2016. Sustainable Development Goals. Diakses pada 25 Oktober 2022 Pukul 22.23 wita, hlm.1. <https://www.sdg2030indonesia.org/>.
  - (3) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2022. Jaga Ketahanan Pangan, Kantor Staf Presiden Dukung Pengembangan P2L Kementan. Diakses pada 25 Oktober 2022 Pukul 22.23 wita. Hlm.1.  
<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4495>
  - (4) Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur. 2022. Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022, hlm.357 dan 359.  
<https://kaltim.bps.go.id/publication/download.html>
  - (5) Astuti, Retno Sunu., Hardi Warsono, dan Abd. Rachim. 2020. Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik. Program Studi Doktor Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Press, Semarang. Hlm.100.
  - (6) Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edition 3. Sage Publications, Inc. California, hlm.14.

**Halaman Sengaja di Kosongkan**